# DESENTRALISASI DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KRISIS AIR BERSIH: STUDI KASUS DI WAY LAGA, BANDAR LAMPUNG

**Amaliyah Husna[1)], Belsya Novalina[2)], Nurul Mardhiyyah[3)], Dhea Ria Anggraini[4)], Nesha Ayu Alfeni[5)], Kahfi Khairul Zildan[6)], Putut Ary Sadewo[7)], Susilo[8)]**

[1)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: amaliyahhusna321@gmail.com
[2)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: belsya2024@gmail.com
[3)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: mardiahnurul956@gmail.com
[4)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: dhearianggraini8@gmail.com
[5)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: nesaaayualfeni@gmail.com
[6)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: kahfizildan5@gmail.com
[7)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: putut.sadewo@fkip.unila.ac.id
[8)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: susilounila@gmail.com

**ABSTRACT**
The clean water crisis in Way Laga Village, Sukabumi District, Bandar Lampung City, is an issue that affects the fulfillment of the community's basic needs. The fact that residents' wells frequently run dry highlights the need for intervention by the local government in exercising its decentralized authority. This study aims to analyze the implementation of decentralization, the responsibilities of the local government, the effectiveness of policies, the challenges in addressing the crisis, and strategies for the sustainable management of the clean water crisis in Way Laga. The research employs a literature review method, utilizing secondary data from scientific journals and academic articles relevant to the clean water crisis. The findings indicate that the Bandar Lampung City Government, through the Regional Disaster Management Agency (BPBD), has provided emergency assistance by distributing clean water to the affected community. However, the recurring nature of the droughts suggests that these measures have yet to ensure a sustainable supply of clean water. Key challenges in addressing this crisis include infrastructure issues, limited water sources, funding constraints, coordination difficulties, and unequal access. The local government needs to strengthen the development of clean water infrastructure, water resource conservation, the exploration of alternative water sources, inter-agency coordination, and community participation. Addressing the clean water crisis must be oriented toward the provision of public services that are equitable, responsive, and sustainable.
**Keywords:** Decentralization, Local Government, Responsibility, Clean Water Crisis, Public Services.

**ABSTRAK**
Krisis air bersih di Kelurahan Way Laga, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, merupakan persoalan yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Fakta bahwa sumur warga sering kali mengering menunjukkan perlunya intervensi dari pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan desentralisasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan desentralisasi, tanggung jawab pemerintah daerah, efektivitas kebijakan, tantangan dalam menangani krisis, serta strategi untuk penanganan krisis air bersih secara berkelanjutan di Way Laga. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang relavan dengan permasalahan krisis air bersih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), telah memberikan bantuan darurat berupa distribusi air bersih kepada masyarakat yang terdampak. Namun, kekeringan yang terus berulang mengindikasikan bahwa langkah-langkah tersebut belum menjamin ketersediaan air bersih yang berkelanjutan. Tantangan utama dalam menangani krisis ini meliputi masalah infrastruktur, terbatasnya sumber air, kendala pendanaan, kesulitan koordinasi, dan akses yang tidak merata. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengembangan infrastruktur air bersih, konservasi sumber daya air, eksplorasi sumber air alternatif, koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat. Penanganan krisis air bersih harus berorientasi pada penyediaan layanan publik yang adil, responsif, dan berkelanjutan.
**Kata Kunci:** Desentralisasi, Pemerintah Daerah, Tanggung Jawab, Krisis Air Bersih, Layanan Publik.

## PENDAHULUAN

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Ketersediaan air bersih berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, kesehatan, sanitasi, serta kualitas hidup masyarakat. Akses terhadap air bersih yang layak dan berkelanjutan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, ketersediaan air bersih masih menjadi tantangan di berbagai daerah, terutama wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya air dan rentan mengalami perubahan kondisi lingkungan. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan faktor alam, tetapi juga berhubungan dengan pengelolaan sumber daya, ketersediaan infrastruktur, dan kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Krisis ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian di Kota Bandar Lampung, khususnya di Kelurahan Way Laga, Kecamatan Sukabumi. Wilayah ini termasuk salah satu daerah yang menghadapi persoalan kekeringan dan keterbatasan akses air bersih. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dari pemerintah. Kondisi ini menjadi alasan penting untuk mengkaji bagaimana pelayanan publik dilaksanakan, terutama dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap sumber air yang memadai.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi wilayahnya. Kewenangan tersebut harus disertai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar. Pemerintah daerah dituntut mampu menentukan kebijakan yang sesuai dengan permasalahan setempat, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, serta memastikan pelaksanaan pelayanan berjalan secara efektif dan merata. Desentralisasi tidak hanya berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Permasalahan yang terjadi di Kelurahan Way Laga menarik untuk dibahas karena berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah menjalankan tanggung jawabnya ketika masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar. Penanganan krisis air bersih tentu membutuhkan perhatian yang lebih, mengingat persoalan ini tidak selalu selesai hanya dengan memberikan bantuan air ketika kekeringan terjadi. Masyarakat juga membutuhkan solusi yang dapat membantu mereka memperoleh air bersih dalam jangka panjang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan kewenangannya dan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam menghadapi persoalan tersebut.

Beberapa Penelitian yang dilakukan sebelumnya telah membahas mengenai 6permasalahan ketersediaan air bersih dari berbagai aspek, seperti kondisi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan pengembangan kebijakan penyediaan air bersih. Namun, pembahasan mengenai krisis air bersih di Way Laga yang dikaitkan secara khusus dengan pelaksanaan desentralisasi dan tanggung jawab pemerintah daerah masih perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengkaji permasalahan tersebut dengan menitikberatkan pada pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, efektivitas penanganan krisis, serta upaya mewujudkan penyediaan air bersih yang berkelanjutan. Fokus pembahasan terletak pada peran pemerintah daerah dalam menangani kesulitan air bersih yang dialami masyarakat serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pembahasan ini penting untuk melihat bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dilaksanakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal penyediaan air bersih.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji permasalahan krisis air bersih di Kelurahan Way Laga, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Studi literatur merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai dasar dalam memperoleh informasi dan memahami permasalahan yang dikaji. Data penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah dan artikel penelitian yang relevan dengan topik krisis air bersih. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan membaca, mempelajari, dan mengkaji isi jurnal serta artikel yang berkaitan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan dengan menelaah informasi dari berbagai referensi, membandingkan hasil pembahasan antar penulis, serta menghubungkan temuan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil kajian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang membahas kondisi krisis air bersih di Kelurahan Way Laga, faktor penyebab, dampak terhadap kehidupan masyarakat, ketersediaan sumber air, kebijakan pemerintah, pelaksanaan desentralisasi, tanggung jawab pemerintah daerah, serta stategi penanganan permasalahan krisis air.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Krisis Air Bersih di Way Laga, Bandar Lampung

Krisis air bersih merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari. Air bersih memiliki peran penting dalam menunjang berbagai aktivitas rumah tangga, seperti memasak, minum, mandi, mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Ketersediaan air bersih yang terbatas tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan risiko permasalahan kesehatan dan sanitasi. Permasalahan tersebut menjadi perhatian di Kelurahan Way Laga, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, yang beberapa kali mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat menurunnya ketersediaan sumber air.

Berdasarkan laporan BPBD Kota Bandar Lampung,

pada tahun 2023, kekeringan dilaporkan terjadi di Jalan Walajaya, RT 05 Lingkungan I, yang berdampak terhadap 108 kepala keluarga atau 321 jiwa. Selanjutnya, pada tahun 2024, kejadian serupa dilaporkan di Kampung Batu Suluh dengan jumlah 56 kepala keluarga atau 178 jiwa terdampak. Permasalahan tersebut kembali terjadi pada tahun 2025 dan 2026 di wilayah Kampung Batu Suluh.

**Table 1.** Data Kekeringan dan Krisis Air di Kelurahan Way Laga Tahun 2023-2026

| Tahun | Lokasi Kejadian | Jumlah KK terdampak | Jumlah Jiwa terdampak | Bantuan air bersih |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Jalan Walajaya, RT 05 Lingkkungan 1 | 108 | 321 | 7.000 liter |
| 2024 | Kampung Batu Suluh | 56 | 178 | 5.000 liter |
| 2025 | RT 17 Lingkungan II, Kampung Batu Suluh | 58 | 178 | Tidak disebutkan |
| 2026 | RT 17 dan RT 18, Kampung Batu Suluh | 113 | ±461 | Tidak disebutkan |

*Sumber: Diolah dari laporan BPBD Kota Bandar Lampung tahun 2023, 2024, 2025, serta laporan Media Lampung oleh Setiawan (2026).*

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa krisis air bersih di Kelurahan Way Laga terjadi secara berulang selama periode 2023–2026. Setiap kejadian memberikan dampak terhadap masyarakat dalam jumlah yang berbeda-beda, tergantung pada lokasi dan cakupan wilayah yang dilaporkan. Pada tahun 2023, sebanyak 108 kepala keluarga atau 321 jiwa terdampak kekeringan. Sementara itu, laporan tahun 2026 mencatat sekitar 113 kepala keluarga atau 461 jiwa terdampak di wilayah RT 17 dan RT 18 Kampung Batu Suluh. Perbedaan angka tersebut perlu dipahami berdasarkan cakupan laporan masing-masing tahun, bukan hanya semata-mata sebagai gambaran peningkatan jumlah masyarakat terdampak.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya krisis air bersih di wilayah tersebut adalah menurunnya intensitas curah hujan yang berdampak pada berkurangnya ketersediaan air tanah. Masyarakat yang masih mengandalkan sumur sebagai sumber utama air bersih menjadi kelompok yang rentan ketika musim kemarau berlangsung. Ketika debit air tanah mengalami penurunan, sumur yang sebelumnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak lagi mampu menyediakan air dalam jumlah yang mencukupi. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketergantungan masyarakat terhadap sumber air tanah yang ketersediaannya dapat dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan dan musim.

Permasalahan ketersediaan air bersih di Way Laga juga perlu dipahami dalam konteks kondisi lingkungan Kota Bandar Lampung secara lebih luas. Ermawati (2022) menjelaskan bahwa ketersediaan air di Kota Bandar Lampung berkaitan dengan perubahan tutupan lahan yang berlangsung secara dinamis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya perubahan tutupan lahan selama periode 2010–2021 yang turut memengaruhi kondisi ketersediaan air. Bahkan, Kota Bandar Lampung mengalami defisit air pada tahun 2021 dan diproyeksikan memiliki tingkat ketersediaan air yang didominasi kategori rendah hingga sangat rendah pada tahun 2031. Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa persoalan air bersih tidak hanya berkaitan dengan faktor musim, tetapi juga berhubungan dengan kondisi lingkungan dan kemampuan wilayah dalam menjaga ketersediaan sumber daya air.

Permasalahan air bersih juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Penelitian Anjani (2021) di Kelurahan Way Laga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara sarana penyediaan air bersih dan kejadian diare pada balita. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa ketersediaan air bersih yang memadai merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kesehatan dan sanitasi. Dengan demikian, krisis air bersih di Way Laga perlu dipahami sebagai persoalan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan kesehatan, sehingga penanganannya tidak cukup hanya dilakukan ketika kekeringan terjadi.

### 4.2. Pelaksanaan Desentralisasi dalam Penyediaan Air Bersih

Desentralisasi merupakan pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar pelayanan publik dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Dalam penyediaan air bersih, pemerintah daerah memiliki peran penting karena lebih dekat dengan masyarakat sehingga dapat mengenali persoalan yang terjadi, menentukan wilayah prioritas, menyusun program, mengelola anggaran, serta memastikan layanan dapat dijangkau oleh warga. Pelaksanaan desentralisasi tidak hanya berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif. Kewenangan yang diberikan perlu diikuti dengan perencanaan yang matang, pengawasan yang jelas, dan koordinasi antarlembaga agar pelayanan yang disediakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Tanpa tata kelola yang baik, desentralisasi berisiko hanya memindahkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah tanpa menghasilkan perbaikan pelayanan. Oleh sebab itu, penyediaan air bersih dapat menjadi salah satu bentuk pelayanan publik yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menggunakan kewenangannya untuk memenuhi

kebutuhan dasar masyarakat (Wicaksono, 2012).

Dalam konteks Way Laga, desentralisasi dapat dilihat melalui peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam merespons kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Pemerintah daerah melalui BPBD telah melakukan penanganan ketika terjadi kekeringan dengan menyalurkan bantuan air bersih. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan daerah dapat digunakan untuk memberikan pelayanan secara langsung ketika masyarakat menghadapi keadaan darurat. Namun, pelaksanaan desentralisasi tidak seharusnya hanya berorientasi pada pemberian bantuan sementara. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang disusun mampu menjawab kebutuhan wilayah yang mengalami keterbatasan akses air secara berulang.

Pelaksanaan desentralisasi juga membutuhkan pembagian tugas dan koordinasi yang jelas antara pemerintah kota, BPBD, pemerintah kelurahan, ketua RT, serta pihak penyelenggara layanan air minum. Setiap pihak perlu menjalankan perannya agar pendataan kebutuhan, penentuan prioritas, dan pelaksanaan pelayanan dapat berlangsung secara terarah. Martino dan Qibthiyyah (2024) membahas pentingnya transfer dan tata kelola dalam mendukung akses air minum layak. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyediaan air bersih tidak hanya berkaitan dengan kewenangan pemerintah, tetapi juga memerlukan tata kelola dan dukungan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, keberhasilan desentralisasi di Way Laga perlu dilihat dari kemampuan pemerintah daerah mengubah kewenangan yang dimiliki menjadi pelayanan air bersih yang terencana dan berkelanjutan.

### 4.3. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Krisis Air Bersih

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani krisis air bersih mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya air memerlukan kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat serta pemerataan akses terhadap air bersih. Hamidah (2015) mengkaji aspek hukum pengelolaan sumber daya air di Kota Bandar Lampung, termasuk kewenangan pemerintah daerah dan kebijakan yang mengaturnya. Pembahasan tersebut memberikan landasan untuk memahami peran pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya air demi kepentingan masyarakat.

Dalam menghadapi keadaan darurat, pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan respons yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan warga. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat dilakukan melalui pendataan masyarakat terdampak, penyediaan bantuan air bersih, serta pengaturan distribusi agar bantuan dapat diterima oleh warga yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan bantuan disertai informasi yang jelas mengenai jadwal dan mekanisme penyaluran. Langkah tersebut penting agar pelayanan tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses secara adil oleh masyarakat yang mengalami kesulitan.

Tanggung jawab pemerintah daerah juga mencakup upaya penanganan jangka menengah dan panjang. Pemerintah perlu mengevaluasi penyebab keterbatasan air, memetakan wilayah yang rentan mengalami kekeringan, serta mempertimbangkan pengembangan sumber air alternatif. Pemeliharaan infrastruktur dan koordinasi dengan penyelenggara layanan air minum juga diperlukan untuk mendukung ketersediaan pasokan. Upaya tersebut perlu direncanakan berdasarkan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan yang dibuat tidak hanya bersifat sementara.

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatasi krisis air bersih dapat dilihat melalui dua bentuk pelaksanaan, yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat ketika terjadi keadaan darurat dan penyediaan layanan yang mampu mengurangi kerentanan dalam jangka panjang. Kedua bentuk tanggung jawab tersebut saling berkaitan. Bantuan darurat tetap diperlukan ketika terjadi kekeringan, tetapi pemerintah juga perlu memastikan adanya tindak lanjut agar pemenuhan kebutuhan air bersih tidak terus bergantung pada bantuan sementara.

### 4.4. Kendala Pemerintah Daerah dalam Penanganan Krisis Air Bersih

Krisis air bersih di Way Laga, Bandar Lampung, merupakan persoalan yang patut mendapat perhatian pemerintah daerah. Situasi ini menegaskan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Penanganan krisis air bersih memerlukan pertimbangan cermat mengenai ketersediaan sumber air, kesiapan infrastruktur, kapasitas keuangan, pemerataan distribusi, serta keberlanjutan layanan bagi masyarakat dalam jangka panjang.

1. **Keterbatasan Infrastruktur dan Jaringan Distribusi Air Bersih**

   Infrastruktur yang terbatas merupakan hambatan utama dalam penyediaan air bersih. Jaringan pipa yang belum lengkap, kapasitas produksi yang terbatas, serta kurangnya pengembangan fasilitas pendukung dapat menghambat akses masyarakat terhadap air bersih. Kondisi seperti ini dapat memperparah dampak kekeringan, terutama ketika ketersediaan sumber air yang selama ini diandalkan oleh masyarakat mengalami penurunan. Martinalova (2025) menjelaskan bahwa penyediaan air bersih di Kota Bandar Lampung menghadapi tantangan terkait keterbatasan jaringan pipa, kapasitas produksi, investasi infrastruktur, serta perluasan layanan ke wilayah pinggiran. Temuan ini menegaskan pentingnya pengembangan infrastruktur yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kasus Way Laga, kondisi jaringan distribusi dan ketersediaan fasilitas air bersih memerlukan perhatian dari pemerintah daerah guna memastikan layanan dapat menjangkau warga yang terdampak.

2. **Kekeringan dan Keterbatasan Ketersediaan Sumber Air**

   Kekeringan merupakan masalah utama yang

mendasari krisis air bersih di Way Laga. Kurangnya ketersediaan air mengganggu pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti air untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci. Ketergantungan pada sumber air yang terbatas memperparah dampak kekeringan ketika sumber-sumber tersebut tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan warga. Manapa (2026) menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang terencana dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan ketersediaan sumber air alternatif, kapasitas sumber-sumber tersebut dalam memenuhi kebutuhan warga, serta kesiapan langkah-langkah penanggulangan jika terjadi kekeringan. Situasi khusus di Way Laga perlu dievaluasi dengan merujuk pada informasi dari laporan media serta data lapangan.

**3. Keterbatasan Anggaran dan Koordinasi Pemerintah**

Menangani krisis air bersih memerlukan dukungan anggaran yang memadai. Pendanaan sangat penting untuk penyediaan air darurat, pembangunan fasilitas penyimpanan, pemeliharaan infrastruktur, serta pengembangan sumber air alternatif. Keterbatasan pendanaan dapat menghambat pelaksanaan program, terutama ketika kebutuhan masyarakat melampaui anggaran yang tersedia. Fitani (2025) menguraikan beberapa tantangan dalam penyediaan air bersih antara lain terbatasnya sumber daya masyarakat, kelemahan mendasar yang kompleks, koordinasi yang buruk, serta rendahnya tingkat partisipasi. Temuan ini menegaskan pentingnya perencanaan anggaran dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyediaan layanan air bersih. Pemerintah daerah harus memastikan pembagian tanggung jawab yang jelas, alokasi dana berdasarkan kebutuhan nyata, serta koordinasi yang efektif di antara lembaga-lembaga terkait. Belum dapat dipastikan apakah kendala anggaran dan koordinasi serupa juga terjadi di Way Laga, mengingat belum ada bukti spesifik yang tersedia untuk wilayah tersebut.

**4. Pemerataan Akses dan Respons terhadap Kebutuhan Masyarakat**

Menjamin akses yang setara terhadap air bersih merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah. Masyarakat yang terdampak kekeringan memerlukan layanan memadai yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus serta kondisi lokal mereka. Cakupan layanan yang tidak merata dapat menyebabkan sebagian penduduk kesulitan memperoleh pasokan air bersih yang mencukupi. Mayasari (2019) menemukan adanya kesenjangan dalam akses terhadap air minum aman antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Lampung, serta variasi tingkat akses di berbagai kabupaten dan kota. Dalam kasus Way Laga, pemerintah daerah harus mempertimbangkan jumlah penduduk yang terdampak, jangkauan distribusi air, kecukupan pasokan, serta kebutuhan jangka panjang masyarakat setempat. Evaluasi layanan secara berkala juga sangat penting untuk mengidentifikasi kekurangan dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang tepat.

### 4.5. Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah

Efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menangani krisis air bersih di Way Laga dapat dilihat dari pelaksanaan bantuan air bersih serta upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan air secara berkelanjutan. Secara hukum, tanggung jawab tersebut mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola sumber daya air dan memenuhi kebutuhan pokok air masyarakat. Selain itu, PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2014 menjadi dasar dalam pengembangan pelayanan dan infrastruktur penyediaan air minum.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memiliki Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Tahun 2022–2042 sebagai arah perencanaan pengembangan pelayanan air minum. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penanganan krisis air tidak hanya dilakukan melalui pendistribusian bantuan ketika kekeringan terjadi, tetapi juga membutuhkan perencanaan penyediaan air bersih dalam jangka panjang.

Data yang menunjukkan bahwa jumlah warga terdampak yang tercatat dalam laporan berbeda pada setiap tahun. Pada 2023 terdapat 321 jiwa terdampak, sedangkan pada 2024 dan 2025 masing-masing tercatat 178 jiwa. Pada 2026, jumlah yang dilaporkan mencapai sekitar 461 jiwa dari wilayah RT 17 dan RT 18. Perbedaan angka tersebut perlu dibaca berdasarkan cakupan masing-masing laporan, sehingga tidak langsung menunjukkan perubahan jumlah penduduk terdampak secara keseluruhan. Meskipun demikian, data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kekurangan air bersih masih muncul dalam beberapa tahun dan membutuhkan penanganan yang tidak hanya bersifat darurat.

Berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan Dunn (2018), pendistribusian air bersih kepada masyarakat Way Laga menunjukkan adanya respons pemerintah terhadap kebutuhan warga. Namun, berulangnya kekurangan air menunjukkan bahwa penanganan darurat tersebut belum cukup menjamin ketersediaan air secara berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan perlu dilihat dari pemerataan bantuan, kecukupan pasokan, serta tindak lanjut pemerintah dalam memperbaiki akses air bersih. Hal ini juga sejalan dengan Galib et al. (2024) yang menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengelolaan pelayanan air bersih. Dengan demikian, kebijakan pemerintah di Way Laga perlu diperkuat melalui perbaikan akses dan pengembangan sarana penyediaan air agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan ketika musim kemarau.

### 4.6. Strategi Penanganan Krisis Air Bersih secara

**Berkelanjutan**

Penanganan krisis air bersih di Kelurahan Way Laga, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, perlu dilakukan melalui strategi jangka pendek dan jangka panjang. Sejauh ini, pemerintah daerah telah melakukan penanganan darurat melalui pendistribusian air bersih menggunakan mobil tangki BPBD. Namun, berulangnya kekeringan sumur warga pada tahun 2023, 2025, dan 2026 menunjukkan bahwa bantuan darurat perlu disertai dengan kebijakan pencegahan dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan beberapa strategi berikut.

1. **Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Air Alternatif**

   Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur penyediaan air bersih, khususnya di wilayah yang rawan mengalami kekeringan seperti Way Laga. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perluasan jaringan perpipaan, pembangunan tempat penampungan air, serta pengembangan sumber air alternatif yang dapat dimanfaatkan ketika sumur warga mengalami kekeringan. Selain itu, pemerintah perlu melakukan pemetaan terhadap sumber air yang berpotensi dikembangkan agar penyediaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rolia et al. (2023) menjelaskan bahwa penyediaan air bersih perlu memperhatikan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat, lingkungan, dan infrastruktur. Dengan demikian, pembangunan fasilitas air bersih tidak hanya berorientasi pada ketersediaan air, tetapi juga memastikan keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.

2. **Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air**

   Strategi selanjutnya adalah melakukan konservasi sumber daya air untuk menjaga ketersediaan air dalam jangka panjang. Pemerintah daerah perlu mendorong perlindungan kawasan resapan air, penghijauan lingkungan, serta pengendalian pemanfaatan lahan yang berpotensi mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air hujan. Salah satu upaya yang dapat dikembangkan di lingkungan masyarakat adalah pemanfaatan air hujan melalui fasilitas penampungan yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Oleh sebab itu, upaya konservasi penting dilakukan agar ketersediaan air tidak hanya bergantung pada kondisi musim hujan, tetapi tetap dapat mendukung kebutuhan masyarakat ketika musim kemarau.

3. **Peningkatan Koordinasi dan Perencanaan Pemerintah Daerah**

   Penanganan krisis air bersih membutuhkan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kota Bandar Lampung, BPBD, dinas terkait, pihak penyedia layanan air minum, pemerintah kelurahan, dan masyarakat. Koordinasi tersebut diperlukan untuk menyusun perencanaan penanganan kekeringan, melakukan pendataan wilayah terdampak, menentukan kebutuhan air, serta mengembangkan program penyediaan air bersih jangka panjang. Koordinasi tersebut perlu diarahkan agar penanganan tidak hanya dilakukan ketika terjadi kekeringan, tetapi juga melalui program pencegahan yang direncanakan dan dievaluasi secara berkala.

4. **Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat**

   Keberlanjutan penanganan krisis air bersih juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Warga perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya menghemat penggunaan air, menjaga kebersihan sumber air, serta memanfaatkan air secara bijaksana. Selain itu, masyarakat dapat dilibatkan dalam kegiatan pemantauan kondisi sumber air, pelaporan apabila terjadi penurunan debit air, dan pemeliharaan fasilitas penampungan air. Dengan demikian, masyarakat Way Laga tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga dapat berperan sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan air bersih di lingkungannya.

Berdasarkan strategi tersebut, penanganan krisis air bersih di Way Laga perlu diarahkan pada perubahan pendekatan dari yang sebelumnya lebih berfokus pada pendistribusian bantuan darurat menjadi pengelolaan air bersih yang terencana dan berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembangunan infrastruktur, perlindungan sumber air, koordinasi antarlembaga, dan keterlibatan masyarakat dapat berjalan secara berkesinambungan. Keberhasilan strategi tersebut dapat dilihat dari meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih, terjaganya ketersediaan sumber air, serta berkurangnya ketergantungan warga terhadap bantuan mobil tangki setiap musim kemarau. Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mampu mengatasi krisis ketika terjadi, tetapi juga mengurangi risiko terulangnya permasalahan serupa pada masa mendatang.

## KESIMPULAN

Krisis air bersih di Kelurahan Way Laga, Bandar Lampung, menjadi persoalan yang terus berulang, khususnya pada musim kemarau. Permasalahan tersebut menimbulkan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta kesehatan masyarakat. Keterbatasan akses terhadap air bersih juga menghambat aktivitas rumah tangga dan meningkatkan kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. BPBD sebagai instansi pemerintah daerah telah melakukan penanganan melalui pendistribusian air bersih menggunakan mobil tangki. Upaya tersebut belum mampu mengatasi persoalan secara menyeluruh karena masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dalam jangka pendek. Pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan berkelanjutan melalui pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air bersih, pengembangan sumber air alternatif, perlindungan

lingkungan, serta penguatan koordinasi dengan melibatkan masyarakat. Perencanaan kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi geografis, kebutuhan penduduk, dan potensi sumber daya air yang tersedia di wilayah tersebut. Keterlibatan masyarakat juga diperlukan untuk mendukung pemeliharaan fasilitas serta pengawasan terhadap pemanfaatan sumber air. Implementasi desentralisasi perlu diarahkan pada penanganan permasalahan secara menyeluruh, baik melalui respons terhadap kondisi darurat maupun perencanaan jangka panjang. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemerataan akses, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjamin ketersediaan air bersih secara berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anjani, F. D. (2021). Hubungan sarana sanitasi dengan kejadian diare pada balita di Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung tahun 2017. *Ruwa Jurai: Jurnal Kesehatan Lingkungan,* 12(1), 17–22.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung. (2023). *Pendistribusian air bersih di Kelurahan Way Laga.*

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung. (2023, 8 November). *Pendistribusian air bersih.*

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung. (2024, 6 November). *Pendistribusian air bersih.*

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung. (2025). Pendistribusian air bersih di Kampung Batu Suluh, Kelurahan Way Laga.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung. (2026). Pendistribusian air bersih di Jalan Raya Suban, Kampung Batu Suluh, Kelurahan Way Laga.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung. (2026, 27 Agustus). *Pendistribusian air bersih.*

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung. (2026, 28 Agustus). *Pendistribusian air bersih.*

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung. (2026, 8 Agustus). *Pendistribusian air bersih.*

Christina, R., & Muttaqin, M. A. (2010). Desentralisasi dan otonomi daerah; desentralisasi, demokratisasi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 13(2), 290–292.

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.

Ermawati, M. (2022). Analisis ketersediaan air bersih dalam mendukung ketahanan kota di Kota Bandar Lampung. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3).

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 33–54.

Fitani, K. R., Adiputra, Y. S., & Charin, R. O. P. (2025). Tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat di Pulau Tanjung Melagan Kota Batam. Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 2(3), 356–368.

Galib, W. K., Irwan, A. L., Thaha, R., Prawitno, A., & Alfiani, N. (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Air Bersih di Kota Makassar. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, *9*(3), 220-227.

Hamidah, U. (2015). Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kota Bandar Lampung. Jurnal Cita Hukum, 3(2), 95609.

Jenahu, G. R., Dhivanda, N. A. S., & Pakabu, D. N. (2023). Konservasi dan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan di Kabupaten Klaten Jawa Tengah. *Prosiding SEMSINA*, *4*(2), 84-87.

Maarif, S. (2013). Meningkatkan Kapasitas masyarakat dalam mengatasi risiko bencana kekeringan. *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia*.

Manapa, S. M., Rasyid, W., & Hidayat, A. (2026). Analisis hukum tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatasi krisis air bersih di Desa Marisa Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur (NTT). Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 4(3), 155–166.

Martinalova, D. (2025). Strategi kebijakan pemerintah melalui skema KPBU dalam penyediaan akses air bersih di Kota Bandar Lampung. Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH), 5(11).

Martino, Y., & Qibthiyyah, R. M. (2024). Akses air minum layak: Apakah transfer spesifik dan tata kelola itu penting? Jurnal Bina Praja, 16(2), 279–290.

Mayasari, T. R. (2019). Clustering akses air bersih dan sanitasi layak kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Dalam Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics dalam Mendukung Implementasi SDG's, 563–572.

Media Lampung. (2026, 11 Agustus). BPBD turun tangan atasi krisis air bersih akibat sumur warga mengering.

Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2014). Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Pemerintah Kota dengan Badan Usaha dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Rolia, E., Oktavia, C., Rahayu, S. R., Fansuri, M., & Mufidah, M. (2023). Penyediaan air bersih berbasis kualitas, kuantitas dan kontinuitas air. *TAPAK (Teknologi Aplikasi Konstruksi): Jurnal Program Studi Teknik Sipil*, *12*(2), 155-165.

Setiawan, A. (2026, 6 Agustus). Kekeringan picu krisis air bersih di Way Laga, ratusan warga terdampak. Media Lampung.

Setiawan, A. (2026, August 6). Kekeringan picu krisis air bersih di Way Laga, ratusan warga terdampak.

Media Lampung.

Suryandari, H., & Isbandono, P. (2025). Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Krisis Air Bersih Akibat Musim Kemarau Di Kecamatan Sukosewu Desa Sumberjokidul Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan*, *3*(2).

Wicaksono, K. W. (2012). Problematika dan tantangan desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 4(1), 21–28.